



CITRA PUBLIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMBERITAAN DI HARIAN SUARA MERDEKA, TABLOID TEMPO, DAN HARIAN REPUBLIKA : KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS MODEL NORMAN FAIRCLOUGH

Gallant Karunia Assidik[✉] dan B.Wahyudi Joko Santoso

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima :
September 2016
Disetujui :
Oktober 2016
Dipublikasikan :
November 2016

Keywords:
critical discourse analysis,
president's image, daily news

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah (a) mendeskripsikan dimensi tekstual, (b) memaparkan praktik wacana, dan (c) memaparkan dimensi sosiobudaya dari pemberitaan *Harian Suara Merdeka*, *Tabloid Tempo*, dan *Harian Republika* dalam membentuk citra presiden. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan metodologis dan teoretis. Pendekatan metodologis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teoretis Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough. Ada tiga tahap analisis yang digunakan, yakni deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Data penelitian ini adalah penggalan wacana pemberitaan tentang Presiden Republik Indonesia dalam rentang masa penerbitan bulan November 2015 hingga Januari 2016. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. *Pertama*, *Harian Suara Merdeka* lebih mengarah ke pembentukan citra positif bagi Presiden, dengan persentase citra positif 51,35%. *Harian Republika* juga condong ke pembentukan citra positif Presiden, melalui persentase 58,3%. Adapun *Tabloid Tempo* 66,67% condong ke pembentukan citra negatif bagi Presiden. *Kedua*, analisis praktik kewacanaan dipusatkan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. *Harian Suara Merdeka*, *Harian Republika*, dan *Tabloid Kompas* memiliki pertimbangan khusus dalam pemilihan isu yang akan disajikan kepada pembaca setiap harinya. Produksi teks berhubungan erat dengan ideologi wartawan dan tindakan yang hendak dicapai. *Ketiga*, teks berita yang diproduksi media dipengaruhi oleh teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural.

Abstract

The focus of this study were (a) describe the textual dimension, (b) exposing the practice of discourse, and (c) exposing the sociocultural dimension of the preaching of Suara Merdeka, Tabloid Tempo and Republika newspaper in shaping the image of the president. The approach used in this study include the methodological and theoretical approaches. The methodological approach used is qualitative descriptive theoretical approaches Critical Discourse Analysis (AWK) Norman Fairclough. There are three stages of analysis used, the description, interpretation and explanation. This research data is a fragment of discourse proclamation of President of the Republic of Indonesia in the issuance of period November 2015 to January 2016. Based on research, obtained the following results. First, Suara Merdeka leads to the formation of a positive image for the President, with the percentage of 51.35% positive image. Republika newspaper also inclined to the formation of a positive image of the President, with the percentage of 58.3%. The Tabloid Tempo 66.67% incline to the formation of a negative image for the President. Second, the analysis of discourse practice focused on how the text is produced and consumed. Suara Merdeka daily, Republika and Kompas Tabloid has a special consideration in the selection of issues to be presented to the readers every day. Text production is closely linked to the ideology of journalists and actions to be achieved. Third, the text of the news produced media influenced by the text, discourse practice and socio-cultural practices.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Kampus Unnes Bendan Ngisor, Semarang, 50233
E-mail: gallantkarunia@gmail.com

PENDAHULUAN

Konstruksi suatu wacana dalam media massa, terutama media cetak memiliki peranan yang sangat krusial dan esensial, khususnya pada tema pemberitaan-pemberitaan yang diangkat dan cara menyajikan wacana tersebut. Pembentukan wacana di media massa sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dimiliki oleh media massa tersebut. Hal inilah yang menjadikan seakan-akan wacana yang termuat menjadi dilematis karena terkadang ideologi yang ada pada media massa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Opini yang timbul akibat pengemasan wacana dalam bentuk berita maupun artikel membuktikan bahwa tidak ada media massa yang sepenuhnya netral. Eriyanto (2009) menganggap bahwa media massa bukanlah saluran bebas dan netral.

Media justru dimiliki oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi kelompok yang tidak dominan. Dominasi tersebut dilakukan dengan cara menghegemoni masyarakat melalui wacana yang merepresentasikan ideologi sehingga pengaruh yang ditimbulkan diharapkan seakan-akan menjadi realitas. Wacana sebagai gagasan umum bahwa bahasa ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika mereka ambil bagian dalam domain-domain kehidupan sosial yang berbeda, misalnya domain 'wacana medis' dan 'wacana politik' (Jorgensen, 2010).

Fenomena tentang keraguan netralitas atas sebuah wacana juga diyakini mengarah ke dalam pemberitaan tentang presiden sekalipun. Setiap surat kabar bahkan memiliki tempat/rubrik tersendiri untuk berita pemerintahan, termasuk pula berita tentang presiden. Seorang presiden mendapat perhatian khusus dari masyarakat karena perannya sebagai seorang kepala negara. Semua orang meyakini bahwa presiden memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan di sebuah negara. Presiden seringkali menjadi sorotan publik ketika terjadi masalah besar di negaranya. Banyaknya pemberitaan yang melibatkan

presiden menjadikan citra presiden sangat beragam di masyarakat.

Berita dalam media massa yang membentuk citra presiden tidak dapat dipisahkan dari peran wartawan sebagai komposer berita dan media massa tempat ia bernaung. Ideologi wartawan dan media massa tidak dapat dipisahkan pula dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Berita yang dihasilkan mencerminkan ideologi wartawan, perusahaan dan kepentingan sosial, ekonomi, atau politik tertentu. Bahasa yang digunakan menunjukkan dari kelompok tertentu (dominan) dan memarginalkan kelompok yang lain. Bahasa tersebut juga dibangun atas kepentingan tertentu dengan maksud tertentu pula.

Latar belakang itulah yang meyakinkan peneliti bahwa *Harian Suara Merdeka*, *Harian Republika*, dan *Tabloid Tempo* mencitrakan presiden sesuai dengan ideologi masing-masing. Pemilihan ketiga media massa tersebut sebagai sumber data dikarenakan ketiga surat kabar tersebut memiliki karakteristik pemberitaan yang berbeda. Karakteristik pemberitaan yang disajikan dipengaruhi oleh ideologi atau kepentingan tertentu dari para pemegang saham surat kabar tersebut. Selain itu, pemilihan ketiga surat kabar juga memperhitungkan cakupan wilayah distribusi surat kabar tersebut.

Pertimbangan lain, usia terbit dan pengalaman dalam dunia jurnalistik di Indonesia serta tingkat popularitas dan keterbacaan atau keberterimaan yang tinggi dimasyarakat maupun pembacanya pada ketiga media massa tersebut. Hal lain yang menjadikan penelitian ini menarik ialah telah terlewatnya momen satu tahun pemerintahan di bawah presiden terpilih pada pemilu 2014. Tentunya hal ini bisa menjadikan tolok ukur mengenai ekspektasi publik yang tercipta selama masa kampanye atas sosok, kebijakan dan kinerja presiden terpilih.

Model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dipilih berdasarkan ideologi dan tahapan yang terdapat pada model tersebut dirasa relevan untuk menjadi model analisis dalam penelitian ini. Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough memetakan objek penelitian menjadi tiga hal, yaitu (a) teks, (b) *discourse*

practice, dan (c) *sociocultural practice* (Fairclough, 1995).

Anshori (2008) telah melakukan penelitian dengan judul “Hegemoni dan Dominasi Bahasa Pejabat dalam Media Massa Pasca-Orde Baru: Analisis Kritis tentang Idiom Politik di Indonesia”. Menurut Anshori, dengan prinsip “berita adalah sesuatu yang tidak biasa”, koran mengumbar penggunaan bahasa-bahasa yang cenderung mengeksploitasi realitas kekerasan dalam masyarakat. Hasil penelitian Anshori (2008) menyebutkan lima bahasa politik yang menghegemoni masyarakat melalui media massa. Kelima bahasa politik tersebut, yaitu (a) bahaya penjurukan (labeling), (b) ideologis dan eufimistik, (c) pascaorde baru, (d) personifikasi politik dan olah raga, dan (e) idiom Pemilu 2004.

Penelitian yang menggunakan pendekatan analisis wacana kritis pernah dilakukan oleh Jupriono, dkk (2009) dengan judul “Makna Terselubung Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Analisis Wacana Kritis”. Simpulan penelitian tersebut adalah dengan perspektif analisis wacana kritis ada lima makna terselubung di balik teks pidato kenegaraan SBY kurun 2004-2008, yaitu (1) menjawab tuntutan publik, (2) menggalang dukungan dari banyak kalangan, (3) membangun optimisme kepada rakyat, (4) mendongkrak citra diri di mata publik, dan (5) meredam kritik dari para lawan/pesaing politis. Kemudian, makna terselubung memojokkan lawan politis tidak ditemukan dalam teks pidato kenegaraan SBY.

Penelitian AWK yang terfokus pada tokoh publik juga pernah dilakukan oleh Sumarti (2010) dengan judul “Analisis Wacana Kritis Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”. Dari temuan dan bahasan dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi politik penggunaan bahasa dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam tataran penggunaan kata, unsur yang tampak adalah penggunaan kata-kata persona, penggunaan kata yang bernuansa “reformasi”, dan “keterbukaan”. Kata persona digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai

alat untuk menunjukkan posisinya dalam wacana politik yang dibangunnya.

Penelitian terkait juga pernah dilakukan Ardianto (2012) dengan judul “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan *Harian Pikiran Rakyat* dan *Harian Republika* sebagai *Public Relations* Politik dalam Membentuk *Branding Reputation* Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi teks *Pikiran Rakyat* cenderung *branding reputation* negatif Presiden SBY. Adapun produksi teks *Harian Republika* cenderung *brandingreputation* positif Presiden SBY. Konsumsi teks *Pikiran Rakyat* adalah pembaca mempersepsi sama(negatif) dengan produksi teks yang dibuat oleh *Pikiran Rakyat*. Selain itu, konsumsi teks *Harian Republika* adalah pembaca berseberangan (negatif) dengan produksi teks yang dibuat oleh *Harian Republika* bahwapemberitaan itu cenderung *branding reputation* positif Presiden SBY.

Selanjutnya pada tahun 2010, Wah dan Ming melakukan penelitian dengan judul “*A Critical Discourse Analysis of the Malaysian Smart Schools (MSS) Conceptual Blueprint and Implication to Implementation*”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa wacana konsep cetak biru (*conceptual blueprint*) dapat dilihat sebagai wacana yang spekulatif, berkembang dan diisi dengan ketegangan diskursif. Dalam menggunakan CDA sebagai alat, penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran dari berbagai pihak yang terlibat untuk lebih kritis terhadap wacana ideologis yang diinvestasikan melalui media massa. Hal tersebut dikarenakan sifat semua teks sebagai representasi kompleks dan konstruksi praktik-praktik sosial dari posisi ideologis penguasa.

Penelitian tentang analisis wacana kritis dalam dunia politik juga diteliti oleh Bayram (2010) yang melakukan penelitian dengan judul “*Ideologi and Political Discourse: a Critical Discourse Analysis of Erdogan’s Political Speech*”. Bayram menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough untuk membedah pidato politik Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan. Penelitian ini secara khusus menganalisis wacana pidato politik, yaitu pidato

singkat Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan saat berdebat dengan Presiden Israel, Shimon Peres, di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada tahun 2009. Hal yang dianalisis yaitu penggunaan bahasa untuk merealisasikan kekuasaan dalam lingkungan politik.

Selain itu, McIntyre, Francis, dan Chapman (2011) dalam jurnal penelitian berjudul “*Shaping Public Opinion on the Issue of Childbirth; A Critical Analysis of Articles Published in An Australian Newspaper*” melakukan penelitian dengan metode analisis wacana kritis pada artikel di surat kabar Australia. Hasil penelitian ini adalah Peneliti dalam artikel berusaha untuk membentuk opini publik mengenai layanan bersalin di Australia. Layanan bersalin di Australia digambarkan sebagai layanan yang memusingkan dan tidak fleksibel. Dalam artikel yang diteliti, masyarakat umum seperti dibentuk opininya agar bingung, takut, dan mengalami konflik dalam diri sendiri.

Selanjutnya, Ahmadian dan Farahani (2014) melakukan penelitian yang berjudul “*A Critical Discourse Analysis of The Los Angeles Times and Tehran Times on the Representation of Iran’s Nuclear Program*”. Penelitian yang dimuat dalam jurnal *Theory and Practice in Language Studies* tersebut menyimpulkan bahwa dua surat kabartersebut menelaah masalah nuklir secara berbeda, sesuai dengan ideologi masing-masing, yaitu menggunakan strategi makro positif presentasi diridan startegi presentasi negatif. Strategi ideologi tersebut diwujudkan dengan strategi diskursif lain seperti: tata bahasa leksikal, anggapan, konsensus, hiperbola, ilegalitas, danpengakuan (klaim).

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul “*Citra Publik Presiden Republik Indonesia pada Pemberitaan di Harian Suara Merdeka, Tabloid Tempo, dan Harian Republika: Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough*” belum pernah dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya sesuai prinsip kekinian dan pengembangan keilmuan. Masalah yang diungkap dalam penelitian ini meliputi dimensi tekstual, praktik kewacanaan, dan dimensi sosiokultural pemberitaan di *Harian*

Suara Merdeka, Harian Republika, dan Tabloid Tempo dalam pembentukan citra publik presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsi dimensi tekstual, menginterpretasikan praktik kewacanaan, dan menjelaskan (eksplanasi) dimensi sosiokultural pada pemberitaan di ketiga media massa tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk keilmuan, terutama dalam bidang kajian analisis wacana kritis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pilihan pustaka dalam mengkaji fenomena kebahasaan dari sudut pandang penggunaan alat interpretasi wacana, terutama penggunaan model analisis wacana kritis Norman Fairclough.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan metodologis dan teoretis. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan teoretis Analisis Wacana Kritis (AWK) atau *Critical Discourse Analysis* (CDA) Norman Fairclough.

Desain penelitian yang digunakan adalah analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough memetakan objek penelitian menjadi tiga hal, yaitu (a) teks, (b) *discourse practice*, dan (c) *sociocultural practice* (Fairclough, 1995). Sumber data yang digunakan adalah wacana pemberitaan ihwal guru dalam surat kabar *Suara Merdeka, Harian Republika, harianKompas* dan *Tabloid Derap Guru* dalam rentang penerbitan pada bulan November 2015 sampai Januari 2016.

Metode pengumpulan data menggunakan (a) metode simak bebas libat cakap, (b) catat, (c) wawancara, (d) studi pustaka, dan (e) dokumentasi. Metode analisis data dilakukan sesuai dengan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, yakni (a) analisis teks, (b) praktik kewacanaan, dan (c) praktik sosiokultural. *Pertama*, teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, tata kalimat, dan kohesi serta koherensi antarkalimat. *Kedua*, praktik kewacanaan

dilakukan dengan cara menganalisis proses produksi, konsumsi, dan distribusi teks. *Ketiga*, praktik sosiokultural dianalisis dengan menggunakan tiga tingkatan level, yaitu (a) situasional, (b) institusional, dan (c) sosial.

Pada tahap analisis, dilakukan deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi pada wacana yang menjadi sumber data. Pada tahap deskripsi diuraikan isi dan analisis secara deskriptif atas teks. Selanjutnya, interpretasi, yakni menafsirkan teks yang dihubungkan dengan praktik wacana. *Ketiga*, eksplanasi, dilakukan dengan mengkorelasikan produksi, konsumsi, dan distribusi teks dengan praktik sosiokultural yang berkembang di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Tekstual

Pada tahap analisis tekstual aspek representasi dipilah menjadi representasi dalam anak kalimat (klausa), representasi dalam kombinasi anak kalimat (klausa), dan representasi dalam rangkaian antarkalimat. Berdasarkan analisis tekstual akan terlihat bagaimana surat kabar mencitrakan Presiden Jokowi melalui pemberitaan yang ditampilkan. Berikut adalah analisis tekstual dari wacana berita yang mengarah ke pembentukan citra positif dan negatif bagi Presiden Joko Widodo.

- 1) *Publik kecewa terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-JK setahun ini. Harapan bahwa Jokowi akan membawa perubahan meredup setelah melihat kinerja para pembantunya. Jokowi juga dianggap lebih mementingkan akomodasi politik dalam menyusun kabinet. (Sekali Lagi Reshuffle Tempo 8 November 2015 hal.10)*
- 2) *Jokowi juga diminta tidak me-reshuffle kabinet hanya karena desakan parpol-parpol pendukung atau kekuatan tertentu yang memaksakan kehendak. Presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat. Hal itu dikatakan Herdi dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat di Cikini, kemarin. (Reshuffle Harus Segera Dipastikan, Suara Merdeka 9 November 2015 hal. 15)*

- 3) *Dua kursi yang didapatkan untuk PAN merupakan pengurangan satu kursi dari PKB dan Nasdem. Selain itu, dengan masih mengambanginya reshuffle maka dinilai Bambang akan membuat menteri-menteri tidak nyaman bekerja. Menurut dia, solidaritas kabinet akan sulit dicapai bila para menternya terus saja dihantui perombakan kabinet. Bagi pengamat politik, jatah dua kursi untuk PAN bisa saja diberikan Presiden Jokowi, ". (Jatah PKB dan Nasdem dikurangi, Republika 28 Desember 2015)*

Tabloid Tempo memiliki pandangan yang berbeda dalam menyajikan pemberitaan bertema pemerintahan. Pada berita berjudul Sekali Lagi Reshuffle, Tabloid Tempo melalui pilihan kosa kata yang ditampilkan oleh wartawan, Tabloid Tempo mencitrakan Presiden Jokowi secara negatif. Pada kutipan pertama Tabloid Tempo wartawan membuka dengan Subjek kalimat berupa Publik, kemudian Subjek diikuti dengan predikat kecewa. Adapun Objek dari kutipan pertama adalah kinerja pemerintahan Joko Widodo – JK, kutipan diakhiri dengan keterangan waktu setahun ini. Pola Penggambaran tersebut merepresentasikan publik sebagai pihak utama karena digunakan sebagai Subjek kalimat. Wartawan ingin menegaskan bahwa hal tersebut dikatakan oleh publik sehingga seakan-akan menimbulkan kesan bahwa yang dikutip merupakan suara rakyat. Selanjutnya wartawan memperjelas keadaan dengan menggunakan pilihan kata kecewa untuk menggambarkan keadaan yang carut-marut perihal reshuffle di masyarakat. Pemilihan kata kecewa terkesan berlebihan hal ini dikarenakan masih ada pilihan kata lain yang dianggap lebih santun dalam memberitakan isu pergantian kabinet. Pilihan kata lain misalnya tidak puas, acuh atau skeptis. Penggunaan kata kecewa sangat jelas ingin memposisikan masyarakat sebagai pihak yang terluka terhadap kebijakan dan kinerja Joko Widodo-JK. Ekspektasi saat pemilu yang begitu tinggi dengan harapan setelah setahun Pemerintahan berjalan belum mampu memenuhi ekspektasi/ harapan publik akan impian yang selama ini diharapkan. Wartawan

dengan lugas membangun ketimpangan tersebut dengan mengarahkan pada kekecewaan publik terhadap kinerja Joko Widodo – Jk sebagai Objek kalimat. Kalimat ditutup dengan keterangan waktu untuk melengkapai konteks situasional kapan peristiwa tersebut dikonstruksi dan terjadi.

Wartawan Tabloid Tempo dalam kutipan pertama secara tidak langsung ingin memberikan citra negatif pada Presiden Joko Widodo-JK khususnya dalam hal kinerja para menterinya. Selaras dengan hal tersebut pada kutipan kedua digunakan kalimat yang bersifat menguatkan tulisan pada kutipan Pertama. Subjek kalimat kedua yakni Jokowi mengandung maksud wacana ini difokuskan pada sosok Presiden Republik Indonesia tersebut. Predikat sebagai penjelas apa yang dilakukan Subjek berisi ekspektasi publik yakni akan membawa perubahan. Predikat tersebut termasuk dalam kalimat aktif dengan imbuhan *me-* sebagai penjelas dari maksud membawa perubahan bagi masyarakat indonesia ke arah yang lebih baik. Penggalan wacana pada kalimat kedua ditutup dengan pelengkap subjek meredup setelah melihat kinerja pembantunya. Kalimat tersebut cenderung menggiring opini publik untuk menghakimi bahwa kinerja Joko Widodo memang tidak secemerlang yang diharapkan. Kata meredup pada akhir kalimat sengaja digunakan untuk mengasosiasikaln dengan citranya yang cemerlang semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Surakarta.

Penggunaan kata meredup apabila dikaitkan dengan fungsi linguistik berarti ada pemajasan tertentu. Meredup lazim digunakan sebagai keterangan pada benda yang memancarkan sinar seperti lampu, matahari atau bulan. Majas yang mennganggap hal mati menjadi hidup disebut personifikasi. Personifikasi dalam penggalan wacana tersebut seakan menggambarkan bahwa popularitas dan citra yang telah dibentuk Joko Widodo perlahan mulai hilang. Meredup dalam akhir kalimat tersebut seakan berlebihan padahal jika ditelisik lebih dalam masih ada kata lain yang terasa lebih halus dan sopan seperti berkurang, memudar atau lemah. Kata meredup dalam penggalan

tersebut menggiring opini bahwa citra yang tengah dibangun menuju keambang kegelapan atau kematian. Wartawan tentunya sudah mempertimbangkan pilihan kata tersebut untuk menjelaskan dan menggiring opini pembaca bahwa kinerja pemerintahan dalam hal pergantian kabinet memang buruk.

Kutipan selanjutnya berisi anggapan kepada Jokowi tentang maksud dibalik kinerja buruknya. Subjek kalimat tersebut yakni Jokowi mengandung maksud, wartawan ingin pembaca terfokus pada sosok tersebut. Jokowi digambarkan sebagai sosok sentral terhadap kinerja pemerintahan yang kian melemah. Selanjutnya penggalan tersebut berisi kutipan dianggap lebih mementingkan akomodasi politik dalam menyusun kabinet. Kutipan tersebut menjadi hal menarik hal ini dikarenakan kutipan tersebut merupakan asumsi dari wartawan tentang manuver politik Joko Widodo. Penggunaan kalimat aktif dengan imbuhan *me-* dalam kata mementingkan ingin menggambarkan bahwa seorang presiden seharusnya mementingkan kebijakan rakyat, akan tetapi wartawan mengemasnya dengan memberikan citra negatif ke arah kepentingan politik. Sosok Jokowi dalam bermanuver politik dianggap mementingkan akomodasi politik dari partai pendukung.

Penggalan wacana dari Tabloid Tempo merepresentasikan citra negatif bagi sosok Joko Widodo khususnya dalam hal pemilihan menteri dan kinerja pemerintahan. Penggiran opini dengan penggunaan kata yang asumtif, personifikasi negatif dan diksi yang berlebihan ingin menjalaskan bahwa wartawan tempo memiliki pandang miiring terhadap Joko Widodo seputar reshuffle kabiner dan kinerjanya dalam memilih menteri.

Representasi dalam pilihan kosa kata menganalisis pilihan kata dan frasa yang digunakan oleh wartawan dalam pemberitaan. Pada awal berita wartawan menggunakan kata publik untuk menyebut subjek kedua dalam berita yang bisa diartikan pembaca, masyarakat atau rakyat. Pada berita ini, pada kalimat pertama subjek dalam berita dibuat aktif, hal ini

bertujuan untuk menekankan pada kekecewaan publik.

Jika subjek berita ini dibuat aktif maka dapat dibalik menjadi kinerja pemerintahan Joko Widodo-JK setahun ini mengecewakan publik. Wartawan menggunakan kata kinerja yang berarti mencakup keseluruhan program kerja dan kebijakan yang dilakukan Jokowi. Wartawan juga memilih subjek dalam berita ini adalah pemerintahan Joko Widodo-JK yang merujuk pada Presiden Jokowi, wakilnya, dan para menterinya. Maka kinerja yang dimaksud dalam berita ini adalah kinerja Presiden Jokowi, wakilnya, dan para menterinya bukan hanya presiden semata.

Pada kalimat kedua terdapat modalitas relasional intensional yang berupa harapan Jokowi dapat membawa perubahan. Pada kalimat kedua dan ketiga wartawan tidak lagi menggunakan kata pemerintahan Jokowi-JK tetapi hanya Jokowi. Hal ini mencitrakan bahwa kegagalan pemerintahan Jokowi terletak pada ketidakmampuan Jokowi dalam memilih dan mengatur pembantunya. Dalam berita ini untuk menyebut wakil presiden dan para menteri wartawan menggunakan kata pembantu, hal ini menimbulkan nilai rasa negatif.

Dilihat sekilas dapat langsung terlihat bahwa berita tersebut mencitrakan Presiden Jokowi secara negatif. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya klausa publik kecewa terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-JK yang merepresentasikan kegagalan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Kata kinerja pemerintahan memberikan efek bagi pembaca bahwa seluruh kinerja pemerintahan Jokowi-JK gagal. Penguatan kegagalan pemerintahan Jokowi-JK dijelaskan pada kalimat berikutnya dengan penggunaan verba meredup yang bermetafora bahwa maknanya harapan rakyat tidak lagi besar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Penggunaan kata lebih mementingkan pada kalimat ketiga juga mencitrakan pemerintahan Jokowi-JK lebih mengutamakan kepentingan personal kabinetnya dibandingkan kinerjanya.

Suara Merdeka dalam pemberitaan tentang reshuffle cenderung ke arah pembangunan citra positif. Penggalan wacana

dari suara merdeka diawali dengan subjek Jokowi diikuti dengan predikat berupa kalimat pasif diminta tidak me-reshuffle kabinet. Selanjutnya pelengkap predikat berupa alasan atas tentang ditolaknya reshuffle tersebut. Alasan tersebut yakni hanya karena desakan parpol pendukung atau kekuatan tertentu yang memaksakan kehendak.

Penggunaan kalimat pasif pada penggalan wacana tersebut mengandung maksud penegasan bahwa sesungguhnya peran sosok di belakang Jokowi sedang disembunyikan dari fokus utama. Wartawan suara merdeka ingin menjelaskan kepada publik bahwa sejatinya reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Joko Widodo digambarkan sebagai sosok presiden yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Pemasifan kalimat tersebut juga memiliki unsur tersembunyi yakni siapakah aktor dibalik sosok Joko Widodo. Selanjutnya kalimat berisi tentang alasan sebab-akibat dengan konjungsi hanya karena. Wartawan suara merdeka ingin mencitrakan sosok Joko Widodo sebagai sosok yang memahami kondisinya dengan memberikan alasan kausal sebab akibat tersebut. Selanjutnya wartawan ingin menjelaskan bahwa ada kekuatan yang cukup besar di belakang Joko Widodo yakni parpol pendukung dan kekuatan tertentu.

Pronomina dalam penggalan wacana tersebut mengidentifikasi suara merdeka sudah cukup hangat dengan sosok Joko Widodo. Wartawan suara merdeka ingin membangun kedekatan secara persona antara presiden dengan masyarakat dengan penggunaan kata ganti yang cenderung lebih merakyat saat dilakukannya pilpres pada 2014 lalu.

Citra positif kembali ini ditunjukkan wartawan suara merdeka dengan penggalan wacana yang bersubjek presiden, diikuti dengan predikat harus mengutamakan kepentingan rakyat. Pada kalimat sebelumnya pronomina subjek ialah Jokowi tetapi pada penggalan kedua pronomina berganti menjadi presiden. Analisis pergantian pronomina menunjukkan bahwa maksud pergantian tersebut ialah penggambaran bahwa sosok Jokowi adalah presiden yang merakyat. Selanjutnya kalimat

diikuti oleh sebuah kalimat imperatif yang menyatakan keharusan mementingkan rakyat. Hal tersebut dimunculkan untuk mengingatkan Jokowi terhadap nawacita yang telah diusung pada pencalonan presiden 2014 lalu.

Penggalan wacana terkait *reshuffle* pada Harian Republika diawali dengan sebuah kalimat berita yang bersifat implikatif. Subyek kalimat tersebut merupakan nomina yakni kursi pemerintahan untuk PAN sedangkan predikat dari kalimat tersebut ialah merupakan pengurangan dilanjutkan dengan pelengkap predikat yakni dari PKB dan Nasdem. Kalimat kedua berisi subjek berupa seorang pengamat politik yakni Bambang. Pengamat tersebut memberikan penilaian yang menempati fungsi objek kalimat. Kalimat pada penggalan wacana kedua ditempati oleh pelengkap objek. Inti dari penggalan tersebut ialah wartawan Republika ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa kursi yang didapatkan PAN merupakan hasil dari reduksi dari jatah partai pendukung. Selanjutnya pada kalimat berikutnya subjek diisi oleh pronomina dia. Dia yang dimaksud ialah pengamat politik yakni Bambang. Subjek disini menjelaskan solidaritas memiliki hubungan sebab akibat dengan ketenangan kondisi kabinet atau dengan kata lain tanpa dihantui isu perombakan kabinet yang menempati fungsi Objek.

Republika dalam penggalan tentang isu *reshuffle* sekan sangat berhati-hati dalam memberitakan pola pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga menggunakan pendapat dari pengamat politik. Wartawan republika secara tidak langsung menekankan terjadinya *reshuffle* untuk ditempati oleh pos partai yang bernafaskan islam kuat yakni PAN.

Setelah dilakukan analisis mendalam dari sisi pronomina didapatlah karakteristik pembeda antar ketiga media massa tersebut, berikut adalah hasil dari analisisnya. Tempo menggunakan kata “publik” untuk menyebut rakyat indonesia. Tempo juga secara konsisten menyebut nama Jokowi untuk Presiden Joko Widodo. Pemilihan pronomina tersebut seakan memiliki unsur tidak menghormati atau kurang menghargai sosok Joko Widodo sebagai Presiden Republik

Indonesia. Pada Pemilu 2014 memang stereotip sosok Joko Widodo lebih dikenal dengan Jokowi, tim kampanye membentuk citra dan branding dari Joko Widodo menggunakan nama yang merupakan singkatan dari namanya akibatnya nama tersebut seakan membah. Publik lebih akrab dengan sapaan Jokowi dari pada Joko Widodo. Seharusnya walaupun terasa lebih akrab dan familiar Tabloid Tempo memberikan apresiasi terhadap Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dengan penggunaan pronomina yang lebih santun dan bermartabat dalam pemberitaannya. Suara Merdeka dalam kacamata pronomina cenderung tidak konsisten dalam menyebut presiden, terkadang penyebutan menggunakan nama “Jokowi” dan terkadang menggunakan kata “Presiden”. Inkonsistensi ini diperbolehkan karena menyesuaikan isi pemberitaan, tetapi akan lebih baik jika pronomina lebih santun dan bermartabat. Selain itu Pembahasan kearah politik acapkali menarik parpol pendukung pemerintahan. Parpol-parpol tersebut tidak secara vulgar dipaparkan dalam berita akan tetapi menjadi semacam misteri tersembunyi yang harus dimaknai dan disimpulkan sendiri oleh pembaca. Parpol-parpol pendukung (koalisi) pemerintah merujuk pada PDI, PKB, Nasdem, Hanura, PKP. Harian Republika dalam analisis pronomina mendapatkan simpulan penggunaan ungkapan “dua kursi” dan pronomina dia. Kata tersebut bermakna kata ganti yang memiliki maksud tertentu, pada kata dia digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang berulang yakni penjelasan dari pakar politik. Selanjutnya ungkapan “dua kursi” merepresentasikan bagi-bagi jatah kedudukan di pemerintahan.

Analisis selanjutnya yakni diksi dan aktif pasif. Tempo dalam pemberitaannya memiliki karakteristik menggunakan kata “meredup” untuk menggambarkan kepercayaan rakyat ini terlalu berlebihan. Bisa saja menggunakan kata “berkurang”, Menyebut para menteri Kabinet Kerja dengan sebutan “pembantunya” ini memiliki nilai rasa negatif., Menggunakan kata “akomodasi politik” untuk menggantikan “kepentingan politik” agar terkesan lebih halus. Selain itu, lebih menggunakan kalimat pasif.

Hal ini terlihat pada Kutipan: Jokowi juga dianggap lebih mementingkan akomodasi politik dalam menyusun kabinet. Harian Suara merdeka dalam diksi atau pilihan kata cenderung didominasi kata yang deksriptif. Selain itu, dari sisi aktif-pasif Antara kalimat pasif dan aktif seimbang. Aktif: Jokowi juga diminta tidak reshuffle kabinet hanya karena desakan parpol pendukung atau kekuatan tertentu yang memaksakan kehendak. Pasif: Presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat. Harian Republika dalam diksi menggunakan kata “kata kursi” untuk menyebut posisi menteri agar terlihat lebih halus Menggunakan kata “solidaritas” untuk menyebut rasa kerjasama para menteri terdapat kata “menghantui” untuk menggambarkan kekhawatiran para menteri. Kata “perombakan” untuk mengganti kata “pergantian”. Aktif pasif pada harian Republika lebih banyak menggunakan kalimat pasif. solidaritas kabinet akan sulit dicapai bila para menterinya terus saja dihantui perombakan kabinet.

Analisis lain yang patut menjadi pertimbangan ialah analisis modalitas. Suara merdeka dalam analisis modalitas memiliki modalitas yang cenderung intensional atau memiliki harapan. Modalitas pada Tempo jelas Intensional hal ini dikarenakan adanya harapan bahwa Jokowi akan membawa perubahan. Harian Republika menggambarkan modalitas sebagai modalitas erpistemik: solidaritas kabinet akan sulit dicapai bila para menterinya terus saja dihantui perombakan kabinet.

Setelah dilakukan analisis mendalam tentang citra Presiden Republik Indonesia dalam pemberitaan di Harian Suara Merdeka, Harian Republika, dan Tabloid tempo didapatkan pemetaan pemberitaan positif negatif. Pemetaan tersebut mengacu pada isi berita setelah dilakukan analisis secara komprehensif. Dalam kurun waktu November 2015 sampai Januari 2016 dalam Harian Suara Merdeka ditemukan 74 berita ihwal Presiden Jokowi, lalu 36 berita dalam Harian Republika, dan Tabloid Tempo menyajikan 18 berita. Keseluruhan berita tersebut dipetakan menjadi kelompok berita bercitra negatif, positif, dan abu-abu

(kecenderungan) serta dipetakan menjadi tiga filter yakni pemerintahan, hukum dan ekonomi.

Pada dimensi tekstual, analisis dilakukan melalui tahap representasi. Tahap representasi dipilih menjadi representasi dalam anak kalimat (klausa), representasi dalam kombinasi anak kalimat (klausa), dan representasi dalam rangkaian antarkalimat. Pada representasi dalam anak kalimat dianalisis pilihan kata dan frase yang digunakan oleh wartawan dalam wacana pemberitaan. Representasi dalam kombinasi anak kalimat berfokus pada koherensi dan kohesi dalam kalimat. Secara spesifik, koherensi terdiri atas elaborasi (penjelasan), ekstensi (penambahan), dan hubungan perluasan. Alat kohesi yang digunakan adalah kata ganti (pronomina), kata yang diulang (repetisi), dan kata tunjuk (demonstrativa). Adapun dalam analisis representasi di tingkat rangkaian antarkalimat dilihat bagian atau kalimat mana yang lebih ditonjolkan wartawan dibandingkan dengan kalimat yang lain.

Setelah dilakukan analisis tekstual diketahui bagaimana media massa mencitrakan Presiden. Harian Suara Merdeka lebih mengarah ke pembentukan citra positif bagi Presiden, dengan persentase citra positif 51,35% dibandingkan dengan berita bercitra negatif yang hanya 27,02%. Harian Republika juga condong ke pembentukan citra positif Presiden, melalui persentase 58,3% untuk berita bercitra positif dan 22,22% untuk berita bercitra negatif. Adapun Tabloid Tempo 66,67% condong ke pembentukan citra negatif bagi Presiden, dan sisanya 33,33% mengarah ke pembentukan citra negatif. Persentase dan arah pembentukan citra Presiden ini berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu bulan November 2015 sampai Januari 2016.

Praktik Kewacanaan

Analisis praktik kewacanaan menganalisis bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Fokus dari analisis ini adalah bagaimana sebuah wacana diproduksi. Produksi teks berhubungan erat dengan ideologi wartawan dan surat kabar yang menaunginya. Harian Suara Merdeka memberikan porsi besar pada berbagai

pemberitaan ihwal Presiden. Karena tidak dapat dipungkiri sebagai harian terbesar di Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah mengandalkan Harian Suara Merdeka sebagai sumber informasi terpercaya. Harian Suara Merdeka berusaha obyektif dengan mengedepankan visi bahwa Harian Suara Merdeka bukan merupakan corong pemerintah. Adapun ideologi Harian Republika adalah ideologi pemilikinya, PT Abdi Bangsa, yaitu kebangsaan, kerakyatan dan keislaman; dengan tujuan mempercepat terbentuknya civil society. Orientasi inilah yang sehari-hari dituangkan Republika dalam bentuk informasi dan\ sajian lainnya. Republika pun menampilkan corak jurnalisme yang khas. Republika menyajikan berita cenderung atraktif, jelas, dan tuntas. Berbeda dengan Harian Suara Merdeka dan Harian Republika, Tabloid Tempo cukup independen dalam memberitakan peristiwa yang terjadi, tidak dipengaruhi oleh pihak lain, baik itu dari pribadi maupun lembaga. Secara konseptual, Tempo merupakan majalah mingguan yang padat rubriknya (lebih dari 30 rubrik), dan selalu mengutamakan berita dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, yang berarti selalu tepat, akurat, dan selalu baru. Tempo mencanangkan konsep peliputan berita yang sedapat mungkin dilakukan secara jujur dan tanpa apriori. Semua fakta diliput, baik yang disukai maupun tidak. Pada tahap konsumsi teks, berdasarkan wawancara dengan narasumber yang merupakan seorang pembaca masing-masing surat kabar dan tabloid, pembaca memiliki pandangan yang berbeda atas setiap pemberitaan ihwal Presiden. Pembaca Harian Suara Merdeka memilih Harian Suara Merdeka karena gaya bahasa yang mudah dipahami dan selalu mengupas perkembangan permasalahan Presiden secara mendalam. Adapun pembaca Harian Republika mengatakan bahwa berita yang disajikan akurat dengan gaya bahasa yang digunakan sangat khas. Selanjutnya, pembaca Tabloid Tempo mengutarakan jika Tabloid Tempo selalu memberitakan Presiden dengan sudut pandang yang berbeda dengan media massa yang lain lengkap dengan ulasan mendetail dan tajam.

Hadirnya media dalam pemberitaan sosok Jokowi tak dapat dipisahkan dari kepentingan di balik media tersebut. Kuat cengkraman media dalam pemberitaan benar-benar menentukan apakah informasi yang disiarkan ke publik mengandung kebenaran (*truth*) atau kepalsuan, (*pseudo-truth*). Media, di satu pihak akan menjelma menjadi perpanjangan tangan dari kelompok Kapital tertentu dengan cara menguasai ruang publik. Hal ini terjadi apabila ranah publik oleh politik informasi yang kemudian menjadikan informasi sebagai alat kekuasaan politik. Sebagai contoh, bisa saja kalangan media elektronik dan media massa menganggap apa yang dilakukan oleh seorang sosok Jokowi di kursi kepresidenan secara pemberitaan mengandung efek negatif di mata publik. Media boleh jadi mencoba untuk memberitakan sesuatu secara objektif dan transparan akan tetapi berbagai bentuk tekanan dan kepentingan akan menyebabkan terperangkap dalam politisasi media.

Fakta di atas menunjukkan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, dengan berbahasa manusia sebagai makhluk sosial dapat berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan disebutkan bahwa bahasa merupakan kekuatan (*language is power*). Bahasa dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lainnya, karena ketika orang duduk dalam sebuah tahta kekuasaan pastilah menggunakan bahasa sebagai instrumennya. Terminologi kekuasaan selalu dikaitkan erat dengan politik, maka bahasa memainkan peranan yang vital dalam bahasa politik. Kemudian bahasa politik secara umum dapat didefinisikan sebagai sebagai bahasa yang digunakan oleh perangkat penyelenggara negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan warga negara dalam konteks politik. Dalam konteks politik peranan bahasa sangatlah besar. Proses politik yang terjadi selalu menggunakan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Kemudian bahasa dimanfaatkan untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam konteks sosial, budaya, politik, ekonomi dan keamanan

bahasa juga dimanfaatkan untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat. Itulah sebabnya hubungan antara bahasa dan kekuasaan seperti dua mata uang yang tak bisa dipisahkan. Dengan kata lain bahwa kekuasaan menunjukkan kemampuan seorang individu atau segelintir orang untuk memaksakan kehendak kapanpun dan dimanapun terhadap kelompok lainnya. Atas dasar hal tersebut peneliti meyakini wujud Bahasa yang disampaikan Joko Widodo sebagai legitimasi kekuasaan atau bentuk pers kapitalis.

Fenomena *Jokowi effect* juga ternyata tidak lepas dari gurita media yang secara tidak langsung menjadi sponsor pibadinya. Memang sampai detik ini belum ada penelitian tentang hal ini, namun dalam beberapa forum di dunia maya, beberapa pengguna internet mulai disuguhkan dengan fakta-fakta menarik mengenai *Jokowi effect*. Bahkan sebuah laman berani mengatakan Jokowi dan gurita media di belakangnya adalah sebuah konspirasi. Konglomerat Tiongkok dituding ada di balik media yang menggiring masyarakat pada satu kesimpulan tentang kehebatan dan kesederhanaan Jokowi.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian ialah tim IT milik Jokowi (*Jasmev*) yang memasuki seluruh jaringan media. Khususnya media online. Faktanya memang jika dilihat beberapa media yang dimaksud memang sangat intens memberitakan tentang gaya *ndeso* Jokowi, atau blusukan ala Jokowi. Bahasa yang digunakan pun sangat meyakinkan masyarakat. Oleh karena itu dapat dipahami jika pers kapitalis mendapat kecaman yang sangat pedas di tanah airnya sendiri, Amerika. Kecaman itu berbunyi antara lain bahwa surat kabar-surat kabar, media siaran elektronik maupun dunia bisnis yang mendukungnya semua dijalankan oleh orang-orang yang sama. Untuk mengoperasikan suatu bisnis diperlukan uang, dan orang-orang yang menguasai uang memiliki kepentingan dan nilai budaya yang sama. Penerbit, pemilik stasiun-stasiun radio dan televisi, serta para pemasang iklan, menurut sang pengecam semuanya merupakan anggota klub yang sama.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tak seorang pun percaya, kepemilikan atas media tidak pernah mewarnai pemilihan berita. Sebuah surat

kabar di Amerika bagian selatan yang sebagian besar dimiliki oleh kepentingan perusahaan kereta api pernah mengumumkan kepada para stafnya “peristiwa kereta keluar dari rel bukanlah berita bagi surat kabar ini.” Patrik Owen seorang wartawan masalah perburuan mengatakan pada tahun 1970 bahwa “sikap masa bodoh terhadap keadaan buruh” dan desakan untuk menggunakan ruangan di surat kabar bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan institusional” hampir bersifat umum dalam pers Amerika.” (Kusumaningrat, 2007)

Pada akhirnya bahasa dan struktur masyarakat memang tidak dapat terlepas dari hegemoni bahasa. Bahasa yang sudah terinternalisasi dalam kehidupan seluruh masyarakat dan di sepakati atau paling tidak memahami semua tentang arti dan maknanya maka di situ akan terbentuk apa yang disebut dengan bahasa. Demikian halnya dengan kekuasaan dan bahasa orang mampu menguasai orang lain, dengan bahasa pula orang jadi tidak percaya dengan orang lain. Bahasa adalah cara utama untuk mengkomunikasikan isi fikiran. Setiap masyarakat manusia memiliki bahasa dan manusia memiliki kecerdasan aslinya tanpa kesulitan. Terlepas dari itu semua kini bahasa mudah menjadi sebuah dilematis dan mulai berubah maknanya. Bahasa yang dulunya hanya digunakan sebagai alat komunikasi kini sudah bergeser kearah politik, budaya, kekuasaan dan lainnya. Seiring dengan perkembangan wacana , bahasa dijadikan sebuah legitimasi tentang bagaimana orang mampu menguasai orang lain dan bagaimana orang bisa memperdaya dan menguasai musuh-musuhnya. Kekuasaan adalah sebuah konsep abstrak tetapi sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Moore dan Hendry mendefinisikannya sebagai : kekuatan dalam masyarakat yang membuat tindakan terjadi, sehingga dengan menelitinya bisa mengenali siapa yang mengendalikan apa dan demi kepentingan siapa.

Zaman orde baru ketika pemerintah menuduh seseorang sebagai anti pembangunan, komunikasi, ekstrim kiri, ekstrim kanan dan sebutan-sebutan yang lain yang sejenisnya, pasti akan tersingkir baik secara

politik maupun sosial. Ungkapan ungkapan itu telah sedemikian ampuh untuk memberanguskan lawan-lawan politik orde baru. Bahasa adalah ekspresi kekuasaan oleh karena itu bahasa merupakan kancah perhelatan kekuasaan Dalam riil kehidupan manusia sering menggunakan sebuah bahasa dalam membohongi dan menghegemoni seseorang. Dalam kancah perpolitikan ada sebuah bahasa sehingga menjadi isu yang biasa membikin konsentrasi para elite bubar. Kisah manusia adalah kisah lika-laku bahasa, dengan maknanya bahasa mampu mampu mengerakan dunia dengan kekuatan dengan bahasa pula banyak tercecce air mata bahkan darahpun mengalir tiada henti tak terasa. Pedang dihunus dan masa dimolisasi karena bahasa. Aneka kehormatan, kebahagiaan, sakit hati, kekecewaan , semuanya diakhiri dengan kata-kata penguasa merasa menjadi pemilik tunggal bahasa karenanya masyarakat haruslah tunduk denganya. Bahasa yang sering digunakan oleh pemerintah hanya berlaku sepihak dan sering kali pemerintah dalam mengimbangnya isunya menjustifikasi kaum-kaum margina dengan undang-undang sebagai salah satu legitimasi. Hal yang digunakan karena usaha pemerintah dalam mempertahankan kejaiiban dan kekuasaan dari orang-orang yang dianggap membahayakan pemerintah.

Fenomena semacam itu akan terus terjadi sepanjang para penguasa dan kaum cerdik pandai tidak ingin terbuka ditambah faktor bahasa dengan kekuasaan itu bahasa tidak lagi dapat dilihat sebagai alat komunikasi yang netral dan bebas nilai karena bahasa sudah mengandung unsur kekuasaan. Dari situ bahasa dapat dipertanyakannya nilai moralitasnya karena di balik bahasa tersebut makna yang mengindikasikan martabat dan harkat manusia menurun. Hubungan kekuasaan dan bahasa tidak dapat dipisahkan sebab jalannya kekuasaan di tunjukan lewat bahasa dapat melihat siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak berkuasa dapat dilihat dari penggunaan bahasa misalnya pidato-pidato yang di ucapkan saat rapat politik dan rapat-rapat lainnya. Melalui Bahasa, suatu kekuasaan dapat menciptakan citra pihak lain sebagai *subversiv*, inkonstitusional, anti

pembangunan, anti kemapanan dan lain sebagainya yang menggambarkan perlawanan terhadap negara. Pada saat yang sama bahasa juga dapat memberikan citra serba positif, baik dan mulia bagi pemegang kekuasaan.

Dimensi Sosiokultural

Dimensi sosiobudaya (*socio cultural practice*) analisis berdasarkan tiga level, yaitu (a) situasional, (b) institusional, dan (c) sosial.

Penggunaan bahasa dalam konteks politik menunjukkan apakah seorang aktor politik itu memiliki budaya politik yang santun. Ini tergantung dari bahasa politik yang diujarkannya. Susunan bahasa yang disampaikan akan tercermin dan tergambarkan apakah bahasa politik yang disampaikan berbanding lurus dengan perilaku keseharian dari seorang aktor politik. Dari bahasa politik yang ditampilkan ini akan menunjukkan apakah bahasa dan politik selalu mempengaruhi satu dengan yang lain. Oleh karena itu bahasa politik yang ideal seharusnya tidak hanya dilakukan dengan wacana belaka tetapi lebih dari itu bahwa bahasa dan tindakannya tidak direkayasa. Dalam era sekarang ini, sosok Jokowi yang gaya bahasanya *ndeso* menjadi soroton publik karena gaya bahasanya yang apa adanya. Menurut Fairclough ada tiga dimensi yang secara simultan mempresentasikan wacana; pertama, bahasa teks (yang diucapkan, dituliskan, atau ditandai), kedua, praktik wacana (meliputi produksi teks dan produksi tafsiran), ketiga, praktik sosiokultural (meliputi hubungan sosial dan politik yang lebih luas). Dari ketiga pernyataan yang disampaikan oleh Fairclough, Jokowi berhasil melakukan praktik sosiokultural kepada masyarakat dengan cara berkomunikasi langsung dan mencari solusi dari problema yang terjadi di tengah warga ibu kota.

Bahasa dan struktur masyarakat memang tidak dapat terlepas dari hegemoni bahasa. Bahasa yang sudah terinternalisasi dalam kehidupan seluruh masyarakat dan di sepakati atau paling tidak memahami semua tentang arti dan maknanya maka di situ akan terbentuk apa yang disebut dengan bahasa. Demikian halnya dengan kekuasaan dan bahasa orang mampu

menguasai orang lain, dengan bahasa pula orang jadi tidak percaya dengan orang lain. Bahasa adalah cara utama untuk mengkomunikasikan isi pikiran. Setiap masyarakat manusia memiliki bahasa dan manusia memiliki kecerdasan aslinya tanpa kesulitan. Terlepas dari itu semua kini bahasa mudah menjadi sebuah dilematis dan mulai berubah maknanya. Bahasa yang dulunya hanya digunakan sebagai alat komunikasi kini sudah bergeser kearah politik, budaya, kekuasaan dan lainnya. Seiring dengan perkembangan wacana, bahasa dijadikan sebuah legitimasi tentang bagaimana orang mampu menguasai orang lain dan bagaimana orang bisa memperdaya dan menguasai musuh-musuhnya.

Konteks sosial memperhatikan aspek situasional ketika teks tersebut diproduksi. Analisis karakteristik gaya bahasa yang telah dilakukan terhadap judul berita dan gaya kepenulisan harian Suara Merdeka, diperoleh hasil penelitian terhadap ragam gaya bahasa pada judul dan isi berita. Judul berita pada harian Suara Merdeka edisi November-Januari yang memiliki beragam gaya bahasa dalam temuan penelitian ini, dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam gaya bahasa. Temuan gaya bahasa harian Suara Merdeka seperti gaya bahasa klimaks, antiklimaks, eufemisme, tautologi, hiperbol, paradoks, metafora, personifikasi, metonimia, dan antonomasia. Adapun Harian Republika merupakan media massa yang bernafaskan agama Islam. Gaya Penelitian di dalam harian Republika memiliki beberapa karakteristik. Hal tersebut menjadi menarik jika dikaitkan dengan sosio budaya yang melekat pada harian ini. Harian Republika saat ini dimiliki oleh Mahaka Media, dalam wawancara yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa Republika tetap berada dalam koridor media dakwa islam akan tetapi menjadi media yang lebih moderat. Sejarah Tempo membuktikan bahwa media ini merupakan media yang sangat diawasi pemerintah karena gaya bahasanya. Tempo menjadi tabloid nasional dengan bahasa yang vulgar, tendensius dan terbuka. Pemberitaan Tempo ingin mencerminkan bahwa hak kebebasan pers memang harus ditegakan. Tempo dalam menyusun berita

terkadang menggunakan bahasa yang sarkas, dan hiperbol untuk menarik minat pembacanya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data, simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Harian Suara Merdeka lebih mengarah ke pembentukan citra positif bagi Presiden, dengan persentase citra positif 51,35% dibandingkan dengan berita bercitra negatif yang hanya 27,02%. Harian Republika juga condong ke pembentukan citra positif Presiden, melalui persentase 58,3% untuk berita bercitra positif dan 22,22% untuk berita bercitra negatif. Adapun Tabloid Tempo 66,67% condong ke pembentukan citra negatif bagi Presiden, dan sisanya 33,33% mengarah ke pembentukan citra negatif. *Kedua*, citra positif dan negatif tersebut ditentukan oleh praktik wacana yang terdapat di media massa yang bersangkutan. *Ketiga*, teks yang diproduksi media dipengaruhi oleh teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Analisis praktik kewacanaan menganalisis bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Fokus dari analisis ini adalah bagaimana sebuah wacana diproduksi.

Produksi teks berhubungan erat dengan ideologi wartawan dan surat kabar yang menaunginya. Harian Suara Merdeka memberikan porsi besar pada berbagai pemberitaan ihwal Presiden. Karena tidak dapat dipungkiri sebagai harian terbesar di Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah mengandalkan Harian Suara Merdeka sebagai sumber informasi terpercaya. Harian Suara Merdeka berusaha obyektif dengan mengedepankan visi bahwa Harian Suara Merdeka bukan merupakan corong pemerintah. Adapun ideologi Harian Republika adalah ideologi pemilikinya, PT Abdi Bangsa, yaitu kebangsaan, kerakyatan dan keislaman; dengan tujuan mempercepat terbentuknya civil society. Orientasi inilah yang sehari-hari dituangkan Republika dalam bentuk informasi dan\ sajian lainnya. Republika pun menampilkan corak jurnalisme yang khas. Republika menyajikan berita cenderung aktraktif, jelas, dan tuntas.

Berbeda dengan Harian Suara Merdeka dan Harian Republika, Tabloid Tempo cukup independen dalam memberitakan peristiwa yang terjadi, tidak dipengaruhi oleh pihak lain, baik itu dari pribadi maupun lembaga. Secara konseptual, Tempo merupakan majalah mingguan yang padat rubriknya (lebih dari 30 rubrik), dan selalu mengutamakan berita dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, yang berarti selalu tepat, akurat, dan selalu baru. Tempo mencanangkan konsep peliputan berita yang sedapat mungkin dilakukan secara jujur dan tanpa apriori. Semua fakta diliput, baik yang disukai maupun tidak. Pada tahap konsumsi teks, berdasarkan wawancara dengan narasumber yang merupakan seorang pembaca masing-masing surat kabar dan tabloid, pembaca memiliki pandangan yang berbeda atas setiap pemberitaan ihwal Presiden. Pembaca Harian Suara Merdeka memilih Harian Suara Merdeka karena gaya bahasa yang mudah dipahami dan selalu mengupas perkembangan permasalahan Presiden secara mendalam. Adapun pembaca Harian Republika mengatakan bahwa berita yang disajikan akurat dengan gaya bahasa yang digunakan sangat khas. Selanjutnya, pembaca Tabloid Tempo mengutarakan jika Tabloid Tempo selalu memberitakan Presiden dengan sudut pandang yang berbeda dengan media massa yang lain lengkap dengan ulasan mendetail dan tajam.

Dimensi sosiobudaya (*socio cultural practice*) dianalisis berdasarkan tiga level, yaitu (a) situasional, (b) institusional, dan (c) sosial. Konteks sosial memperhatikan aspek situasional ketika teks tersebut diproduksi. Analisis karakteristik gaya bahasa yang telah dilakukan terhadap judul berita dan gaya kepenulisan harian Suara Merdeka, diperoleh hasil penelitian terhadap ragam gaya bahasa pada judul dan isi berita. Judul berita pada harian Suara Merdeka edisi November-Januari yang memiliki beragam gaya bahasa dalam temuan penelitian ini, dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam gaya bahasa. Temuan gaya bahasa harian Suara Merdeka seperti gaya bahasa klimaks, antiklimaks, eufemisme, tautologi, hiperbol, paradoks, metafora, personifikasi, metonimia,

dan antonomasia. Adapun Harian Republika merupakan media massa yang bernafaskan agama Islam. Gaya Penelitian di dalam harian Republika memiliki beberapa karakteristik. Hal tersebut menjadi menarik jika dikaitkan dengan sosio budaya yang melekat pada harian ini. Harian Republika saat ini dimiliki oleh Mahaka Media, dalam wawancara yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa Republika tetap berada dalam koridor media dakwa islam akan tetapi menjadi media yang lebih moderat. Sejarah Tempo membuktikan bahwa media ini merupakan media yang sangat diawasi pemerintah karena gaya bahasanya. Tempo menjadi tabloid nasional dengan bahasa yang vulgar, tendensius dan terbuka. Pemberitaan Tempo ingin mencerminkan bahwa hak kebebasan pers memang harus ditegakan. Tempo dalam menyusun berita terkadang menggunkan bahasa yang sarkas, dan hiperbol untuk menarik minat pembacanya.

Setelah dilakukan analisis mendalam tentang citra Presiden Republik Indonesia dalam pemberitaan di Harian Suara Merdeka, Harian Republika, dan Tabloid tempo didapatkan pemetaan pemberitaan postif negatif. Pemetaan tersebut mengacu pada isi berita setelah dilakukan analisis secara komprehensif. Dalam kurun waktu November 2015 sampai Januari 2016 dalam Harian Suara Merdeka ditemukan 74 berita ihwal Presiden Jokowi, lalu 36 berita dalam Harian Republika, dan Tabloid Tempo menyajikan 18 berita. Keseluruhan berita tersebut dipetakan menjadi kelompok berita bercitra negatif, positif, dan abu-abu (kecenderungan).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadian, Moussa, Elham Farahani. 2014. "A Critical Discourse Analysis of The Los Angeles Times and Tehran Times on the Representation of Iran's Nuclear Program". *Journal Theory and Practice in Language Studies*, Vo. 4, No. 10, pp. 2114-2122, October 2014. ISSN 1799-2591.
- Anshori, Dadang S. 2008. "*Hegemoni dan Dominasi Bahasa Pejabat dalam Media Massa Pasca Orde Baru: Analisis Wacana Kritis tentang Idiom Politik*

- di Indonesia*". Makalah disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional "Peluang dan Tantangan Pengajaran Bahasa Indonesia pada Era Kejagatan dan Situasi Multikultural, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia SPS UPI.
- Ardianto, Elvinaro. 2012. "Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Harian Pikiran Rakyat dan Harian Republika sebagai Publik Relations Politik dalam Membentuk Branding Reputation Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, April 2012. ISSN: 2088-981X.
- Bayram, Fatih. 2010. "Ideologi and Political Discourse: a Critical Discourse Analysis of Erdogan's Political Speech". vol. 7, hal 23-40.
http://research.ncl.ac.uk/ARECLS/volume7/bayram_vol7.pdf
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana-Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis
- Fairclough, Norman. 1995. *Language and Power*. London and New York: Longman.
- Jorgensen, Marianne W dan Phillips, Louise J. 2007. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jupriono, Sudarwati, Anik Cahyaning Rahayu, Ambar Andayani, 2009. "Makna Terselubung Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Analisis Wacana Kritis". *Jurnal Parafraze* Vol. 09, No. 02, September 2009.
- McIntyre, Meredith J, Karen Francis, and Ysanne Chapman. 2011. "Shaping Public Opinion on the Issue of Childbirth; A Critical Analysis of Articles Published in An Australian Newspaper." *BMC Pregnancy and Childbirth* 2011 11:47.
- Sumarti, Endang. 2010. "Analisis Wacana Kritis Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono". *Jurnal LITERA* Volume 9, Nomor 1, April 2010.
- Wah, Lee Kean, Thang Siew Ming. 2010. "A Critical Discourse Analysis of the Malaysian Smart Schools (MSS) Conceptual Blueprint and Implications to Implementation". *The International Journal of Language Society and Culture* Issue 30. ISSN 1327-774x.